

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR  
16 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT  
USAHA (SITU) DI KABUPATEN GAYO LUES**

**TESIS**



Oleh:

**A D A M**  
NPM. 041801009

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) DI KABUPATEN GAYO LUES**

## **TESIS**

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)  
Pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area



Oleh :

**ADAM**

NPM. 041801009

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2006**

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

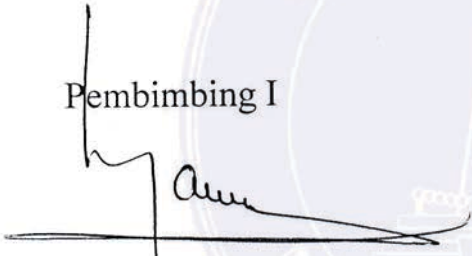
HALAMAN PERSETUJUAN


Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

Nama : A D A M  
N P M : 041801009  
PROGRAM : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
JUDUL : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Surat  
Izin Tempat Usaha ( SITU ) Di Kabupaten Gayo Lues

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. Usman Tarigan, MS

  
Drs. Burhanuddin Harahap, MA

Direktur  
Program Pascasarjana- UMA

Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik

Drs. Heri Kusmanto, MA

Drs. Kariono, MA



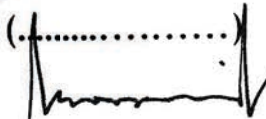

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis  
Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik  
Universitas Medan Area

Pada Hari : **Jum'at**  
Tanggal : **19 Mei 2006**  
Tempat : **Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik  
Universitas Medan Area.**

**PANITIA PENGUJI**

- Ketua : Drs. Kariono, MA 
- Sekretaris : Ir. Erwin Pane, MS 
- Anggota I : Drs. Usman Tarigan, MS 
- Anggota II : Drs. Burhanuddin Hrp, MA 
- Penguji Tamu : Drs. Heri Kusmanto, MA 

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. yang telah mengantarkan umatnya dari masa jahiliah menuju umat yang berilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis menyadari dan mengakui banyak kelemahan serta kekurangan dari penulis, sehingga tesis yang dibuat ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Medan
2. .Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
4. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, sebagai Pembimbing I
5. Bapak drs. Burhanuddin Harahap, MA, sebagai Pembimbing II
6. Bapak Bupati Gayo Lues
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar PPS Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. memberikan rahmat dan pahalanya kepada pihak-pihak yang tersebut di atas sesuai dengan bantuan yang telah dicurahkan, amin.

Medan, 2006

Penulis

Adam



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
RINGKASAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Hipotesis.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kebijakan Publik.....	8
2.2. Implementasi Kebijakan.....	10
2.3. Kebijaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	20
2.4. Pajak Daerah.....	23
2.5. Retribusi Daerah.....	28
2.6. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ).....	31

	<b>halaman</b>
2.7. Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Bentuk Penelitian.....	36
3.2. Lokasi Penelitian.....	36
3.3. Populasi dan Sampel.....	37
3.4. Rencana Sampling.....	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukurannya.....	38
3.6. Operasional Variabel.....	39
3.7. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES</b>	
4.1. Profil Kabupaten Gayo Lues.....	42
4.1.1. Historis Gayo Lues.....	42
4.1.2. Letak Geografis.....	43
4.1.3. Pemerintahan.....	44
4.1.4. Kependudukan.....	44
4.2. Visi dan Misi.....	45
4.3. Perusahaan.....	46
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
5.1. Hasil Penelitian.....	47
5.1.1. Karakteristik Responden.....	47
5.1.2. Variabel Penelitian.....	49



	<b>Halaman</b>
<b>5.2. Analisis Data.....</b>	<b>55</b>
<b>5.2.1. Implementasi Kebijakan Izin Tempat Usaha.....</b>	<b>55</b>
<b>5.2.2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No.16         tahun 2004 tentang SITU.....</b>	<b>56</b>
<b>5.2.3. Kontribusi Retribusi SITU terhadap PAD.....</b>	<b>58</b>
<b>5.2.4. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan PAD dari         Retribusi SITU.....</b>	<b>60</b>
 <b>BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI</b>	
<b>6.1. Kesimpulan.....</b>	<b>62</b>
<b>6.2. Implikasi.....</b>	<b>63</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Sistem Kebijakan Publik.....	9
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan.....	12
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Carl Van Horn.....	14
Gambar 4. Kerangka Pemikiran.....	35



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 5.1. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	47
Tabel 5.2. Distribusi Responden Menurut Umur.....	48
Tabel 5.3. Distribusi Responden Menurut Pendidikan.....	48
Tabel 5.4. Pendapat Responden Tentang Struktur Organisasi.....	49
Tabel 5.5. Pendapat responden Tentang Kualitas SDM.....	50
Tabel 5.6. Pendapat Responden Tentang Peralatan.....	50
Tabel 5.7. Pendapat Responden Tentang Peraturan .....	51
Tabel 5.8. Pendapat Responden Tentang Juknis Peraturan.....	52
Tabel 5.9. Pendapat Responden Tentang Juklak Peraturan.....	52
Tabel 5.10. Pendapat Responden Tentang Prosedur Kerja.....	53
Tabel 5.11. Pendapat Responden Tentang Program Kerja.....	54
Tabel 5.12. Pendapat Responden Tentang Jadwal Kerja.....	54
Tabel 5.13. Rata-rata Skor Implementasi Izin Tempat Usaha.....	56
Tabel 5.14. Perkembangan Penerimaan Retribusi Izin Tempat Usaha.....	59
Tabel 5.15. Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin tempat Usaha Terhadap APBD dan PAD 2003 – 2005.....	59

## Ringkasan

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Gayo Lues yaitu “ Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, terbebas dari keterisolasian dan menurunkan angka kemiskinan berdasarkan Syariat Islam yang kaffah”, telah dilakukan suatu kebijakan tentang Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) melalui Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 16 Tahun 2004. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, disisi lain adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah ( PAD ) Kabupaten Gayo Lues.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah tentang SITU, besarnya kontribusi dari retribusi SITU terhadap PAD, dan faktor yang mempengaruhi implemntasi Perda tentang SITU.

Dalam penelitian ini sample diambil secara purposive sampling dengan jumlah sample sebanyak 32 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, selain itu untuk mengetahui keberhasilan implementasi Peraturan Daerah digunakan metode skoring terhadap tiga faktor yang diukur yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total skor adalah 1,99 yang berarti masuk dalam katagori kurang baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah ( Perda ) nomor 16 tahun 2004 adalah keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat wajib SITU, dan kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai.

Kontribusi retribusi SITU terhadap PAD Kabupaten Gayo Lues masih relative kecil yaitu 0,16 persen pada tahun 2003, 0,65 persen pada tahun 2004, dan 0,49 persen pada tahun 2005.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu meningkatkan peralatan yang mendukung, penyempurnaan data base potensi SITU, pelayanan satu atap, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang SITU.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Gayo Lues dengan Ibu Kota Blangkejeren merupakan sebuah kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induknya Aceh Tenggara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Secara administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri dari sebelas kecamatan dengan jumlah penduduk lebih kurang 80.000 jiwa. Sedangkan letak perbatasan Gayo Lues yaitu batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Nagan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat Daya, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh barat Daya.

Luas Kabupaten Gayo Lues adalah 571.967 ha ( 57,48 % dari luas Aceh Tenggara sebelum dimekarkan atau 9,97% dari luas Provinsi NAD ). Dari luas Kabupaten Gayo Lues ini sebagian besar sekitar 441.953 ha ( 77,27 % ) merupakan kawasan lindung dan hanya sekitar 130.032 ha ( 22,73 % ) merupakan kawasan budidaya.

Sebagaimana kabaupaten baru yang lainnya, Kabupaten Gayo Lues juga sangat terbatas dari berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana, sehingga kondisi sekarang sangat jauh tertinggal dibandingkan kabupaten induk dan kabupaten

lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( NAD ). Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Gayo Lues selain daerah baru juga merupakan salah satu Kabupaten yang terisolasi jauh dari Ibu Kota Provinsi NAD dan juga berada di kaki Gunung Bukit Barisan.

Dalam usianya yang sangat muda ini Kabupaten Gayo Lues juga terus berjuang untuk bangkit mengejar ketertinggalan sehingga dapat mengejar kemajuan dan setara dengan kabupaten lainnya yang telah berkembang. Dalam menjalankan pembangunan maka Kabupaten Gayo Lues juga berpedoman kepada Visi yaitu **“Terwujudnya masyarakat yang bermartabat, terbebas dari keterisolasian dan menurunkan angka kemiskinan berdasarkan Syariat Islam yang Kaffah”**

Pembangunan di Kabupaten Gayo Lues secara perlahan terus berjalan dengan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, namun dalam perjalannya juga tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala sehingga berbagai potensi yang ada sangat sulit untuk dikembangkan dalam rangka merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

Secara konseptual perkembangan Kabupaten Gayo Lues tentu harus ada titik pandang yang tepat sehingga dapat mendorong pertumbuhan daerah ini pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan Kabupaten Gayo Lues dapat dikembangkan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan secara makro dan mikro. Dalam pendekatan secara makro maka pembangunan didukung sebagai bagian dari wilayah yang luas baik secara regional maupun nasional. Sedangkan melalui

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra; 2003, *Audit Sektor Publik*, Jakarta: Visi Global Media.
- Dunn, William N; 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Indarwanto; 2001, *Teori Administrasi Publik dan Birokrasi*, Malang: Taroda.
- Islami, M. Irfan; 2000, *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jones, Charles O; 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho D, Riant; 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Eka Media Kompuntindo.
- Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, 2004, *Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)*, Blangkejeren: Bagian Hukum Setdakab.
- Republik Indonesia, 2000, *Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Bp. Pustaka Candra.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan daerah*, Jakarta: Bp. Pustaka Candra.
- Republik Indonesia, 2001, *Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*, Jakarta : Bp. Pustaka Candra.
- Republik Indonesia, 2001, *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah*, Jakarta: Bp. Pustaka Candra.
- Sugiyono; 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Setiyono; 2004, *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Adminisatrasi*, Semarang: Fisip Undip.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S; 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset.

**Tangkilisan, Hessel Nogi S; 2003, Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta :  
Balairung & Co.**

**Thomas, Colin Coulson; 1996, Public Relations: Pedoman Praktis Untuk PR,  
Jakarta: Bumi Aksara.**

**Utomo, Warsito, 2003, Dinamika Administrasi Publik: Analisis Empiris Seputar  
Isu Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar.**

**Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media  
Pressindo.**

